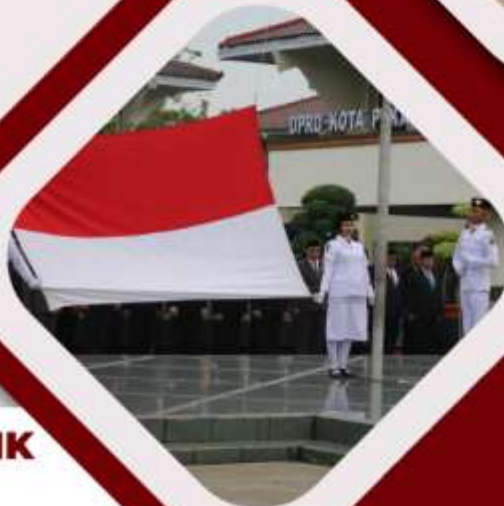




# RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JL. MAJAPAHIT NO. 20 KOTA PEKALONGAN

**BerAKHLAK**  **bangga  
melayani  
bangsa**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 26 Juni 2025

Pt. Kepala Badan Kesbangpol  
Kota Pekalongan



M. FAUZI ROCHMAN, S.STP., M.M

NIP. 19780107 199703 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1. Latar Belakang .....	4
2. Landasan Hukum .....	5
3. Maksud dan Tujuan .....	6
BAB II EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN KOTA PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 .....	7
1. Evaluasi Renja Triwulan I .....	7
2. Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan.....	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	19
1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	19
BAB IV PENUTUP.....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan adalah dokumen yang disusun berdasarkan evaluasi perkembangan keadaan dalam 1 (satu) tahun berjalan. Perkembangan sebagaimana dimaksud adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan / atau keadaan darurat.

RKPD Perubahan adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan tetap relevan dan efektif dalam memajukan wilayahnya. Dengan mengakomodasi perubahan dan dinamika yang ada, RKPD Perubahan membantu memastikan bahwa rencana pembangunan dapat terus menjawab kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Dalam perjalanan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan terdapat berbagai perkembangan. Perkembangan dimaksud terjadi pada aspek belanja, terdapat penambahan, perubahan rincian belanja, serta terdapat pula perubahan target output kegiatan.

Menindaklanjuti perkembangan kerangka perubahan pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan disusunlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan berjalan efisien, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 26);
5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025;

### 3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Serta memberikan informasi kondisi riil beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah melakukan evaluasi dan menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka kegiatan sehingga tercipta sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai yakni;

1. Penyesuaian anggaran kegiatan untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun sehingga anggaran lebih efisien, lebih efektif, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan mendatang sehingga dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat / kebutuhan yang dinamis.
3. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

#### **1. Evaluasi Renja Triwulan I**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b) Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c) Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

**EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				<b>7.997.296.000</b>					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVAKUASI PERANGKAT DAERAH	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	6.624.000	0 dokumen				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	1.148.000	0 dokumen				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	12.000.000	4 laporan				
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/bulan	2.722.835.000	12 orang/bulan				

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	35.875.000	3 dokumen				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.064.000	1 laporan				
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH									
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	5.000.000	0 paket				
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	3.500.000	1 paket				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	48.650.000	1 paket				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	1.650.000	1 paket				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	18.500.000	1 paket				

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	6.060.000	1 paket				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1.890.000	0 paket				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	59.340.000	12 laporan				
<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	730.000	1 laporan				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	57.900.000	3 laporan				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	208.730.000	3 laporan				
<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>									

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	10	Unit	58.410.000	1 unit				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	188.140.000	0 unit				
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17	Unit	7.750.000	6 unit				
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	190	Orang	19.560.000	0 Orang				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.615	Orang	235.900.000	30 orang				

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1.104	Keluarga	1.215.340.000	230 Keluarga				
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1	Dokumen	535.943.000	0 dokumen				
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK									
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600	Orang	1.402.980.000	150 Orang				

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	630	Orang	314.110.000	150 Orang				
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300	Orang	440.900.000	22 Orang				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA									
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	235	Orang	97.837.000	0 dokumen				

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	936	Orang	288.930.000	280 Orang				

## 2. Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan APBD 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Renja D Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025 Triwulan II terhadap pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Tahun 2025 Kota dengan APBD2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan

No	Uraian	Renja 2025	APBD 2025
1	Program	6	6
2	Kegiatan	11	11
3	Sub Kegiatan	29	29
4	Pagu Anggaran	7.002.296.000	7.997.296.000

Untuk jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan pada RKPD 2025 dan APBD 2025 sudah sama yaitu sejumlah 6 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Tetapi terdapat perbedaan jumlah pagu di Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dengan jumlah pagu yang terdapat di APBD 2025. Adanya perbedaan pagu anggaran pada Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan 2025 dengan pagu anggaran pada APBD 2025 terjadi dari proses hasil dinamika dalam pembahasan KUA-PPAS.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025 terdiri dari 6 Program, 11 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.004.856.000,- naik sebesar Rp. 7.560.000,- jika di bandingkan pagu penetapan APBD tahun 2025 sebesar Rp. 7.997.296.000,-

Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dan 1 (satu) Sekretariat

Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekalongan. Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP PRKPD	TERHADAP PABPD
<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>			<b>7.002.296.000</b>			<b>7.997.296.000</b>			<b>8.004.856.000</b>	<b>1.002.560.000</b>	<b>7.560.000</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	3.395.796.000	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	3.445.796.000	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	3.425.231.000	29.435.000	-20.256.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	19.772.000	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	19.772.000	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	19.412.000	-360.000	-360.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.624.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.264.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.264.000	-360.000	-360.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.148.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.148.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.148.000	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	0	0

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG(Rp.)	
	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.722.835.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.722.835.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.722.835.000	0	0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.875.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.875.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.875.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.064.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.064.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.064.000	0	0
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	0	0
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			139.590.000			139.590.000			128.997.000	-10.593.000	-10.593.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,500.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,500.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,500.000	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.650.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.650.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	60.220.000	11.570.000	11.570.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.650.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.650.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.650.000		0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	18.500.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	18.500.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	18.350.000	-150.000	-150.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.060.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.060.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.060.000	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.890.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.890.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	990.000	-900.000	-900.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	59.340.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	59.340.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	38.227.000	-21.113.000	-21.113.000
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			267.360.000			267.360.000			267.360.000	0	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	740.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	740.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	740.000	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.900.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.900.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.900.000	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.730.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.730.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.730.000	0	0
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PEMERINTAH DAERAH			204.300.000			254.300.000			244.688.000	40.388.000	-9.612.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	10 Unit	58.410.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	10 Unit	58.410.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	11 Unit	48.798.000	-9.612.000	-9.612.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	138.140.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	188.140.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	188.140.000	50.000.000	0

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	17 Unit	7.750.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	17 Unit	7.750.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	17 Unit	7.750.000	0	0
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1.946.743.000			2.006.743.000			1.984.808.000	-38.065.000	21.935.000
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1.946.743.000			2.006.743.000			1.984.808.000	-38.065.000	21.935.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	268 Orang	19.560.000	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	268 Orang	19.560.000	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Orang	0	-19.560.000	-19.560.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.000 Orang	235.900.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.000 Orang	235.900.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.615 Orang	213.525.000	-22.375.000	-22.375.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	566 Keluarga	1.155.340.000	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	566 Keluarga	1.215.340.000	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1104 Keluarga	1.235.340.000	80.000.000	20.000.000
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka SIPD-	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	535.943.000	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	535.943.000	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	535.943.000	0	0
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.052.090.000			1.717.090.000			1.699.290.000	-192.594.000	17.800.000
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK			1.052.090.000			1.717.090.000			1.699.290.000	-192.594.000	17.800.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600 Orang	827.980.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600Orang	1.402.980.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	576 Orang	1.400.180.000	572.200.000	-2.800.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	224.110.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	314.110.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	630 Orang	299.110.000	75.000.000	-15.000.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP PRKPD	TERHADAP PAPBD
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			220.900.000			440.900.000			570.913.000	-350.013.000	130.013.000
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			220.900.000			440.900.000			570.913.000	-350.013.000	130.013.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	220.900.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	440.900.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	171 Orang	570.913.000	-350.013.000	130.013.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			97.837.000			97.837.000			67.527.000	-30.310.000	-30.310.000
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA			97.837.000			97.837.000			67.527.000	-30.310.000	-30.310.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	97.837.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	97.837.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	67.527.000	-30.310.000	-30.310.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			288.930.000			288.930.000			257.087.000	-31.843.000	-31.843.000
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			220.900.000			440.900.000			570.913.000	-350.013.000	130.013.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	220.900.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	682 Orang	440.900.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	682 Orang	570.913.000	-350.013.000	130.013.000

## **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan program-program yang ada. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan sangat ditentukan oleh dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai dan stakeholder yang ada. Diharapkan dengan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dapat mencapai target kinerja dalam Tahun 2025 sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Selanjutnya, dalam rangka merinci pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan rencana anggaran, dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Pekalongan, 26 Juni 2025  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekalongan



**M. FAUJIO ROCHMAN, S.STP., M.M**

NIP. 19780107 199703 1 002